

KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGUATAN KEAMANAN MANUSIA (Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov D.I. Yogyakarta)

by Fadhlán Nur Hakiem

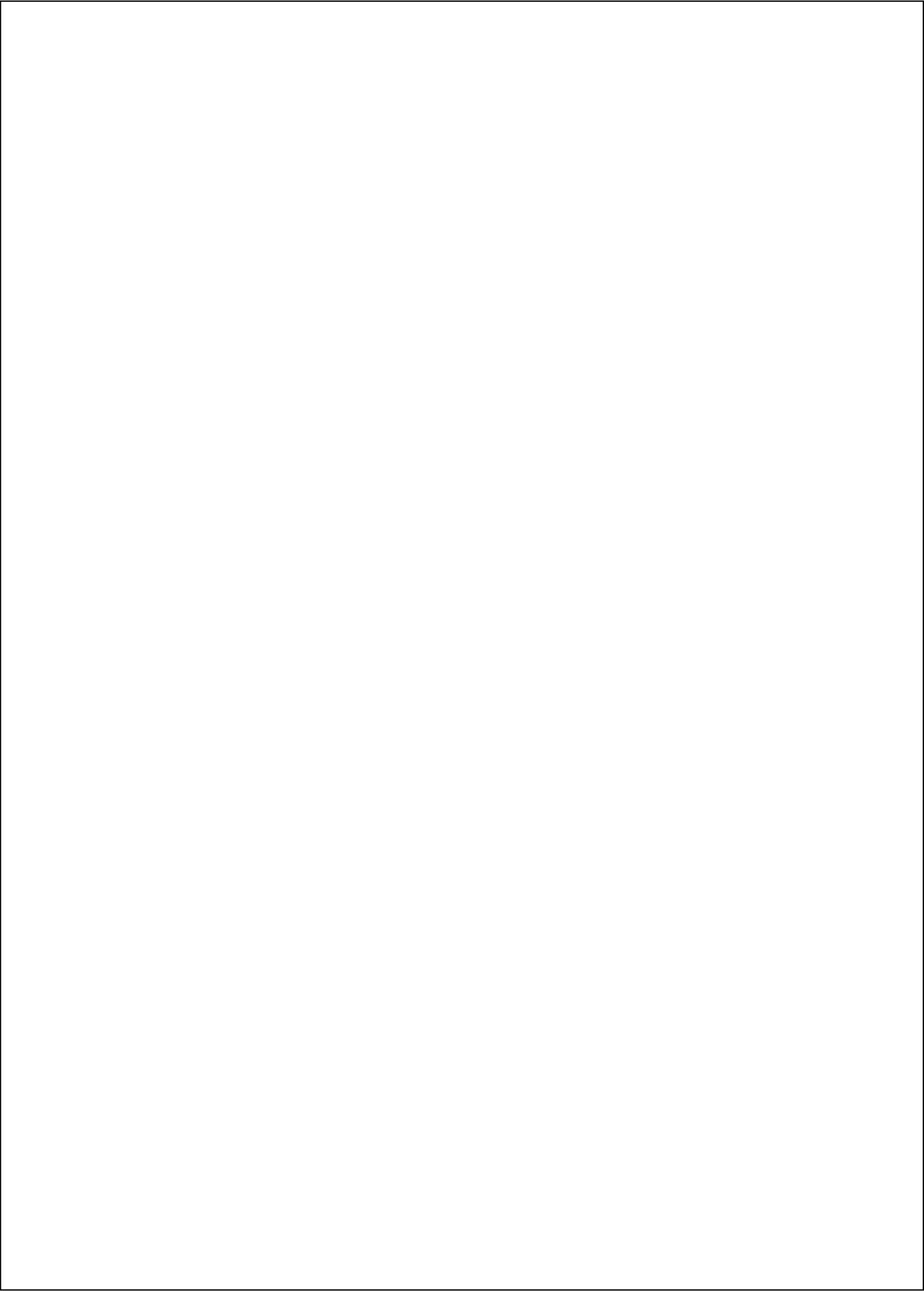
Submission date: 10-Aug-2021 11:00PM (UTC-0500)

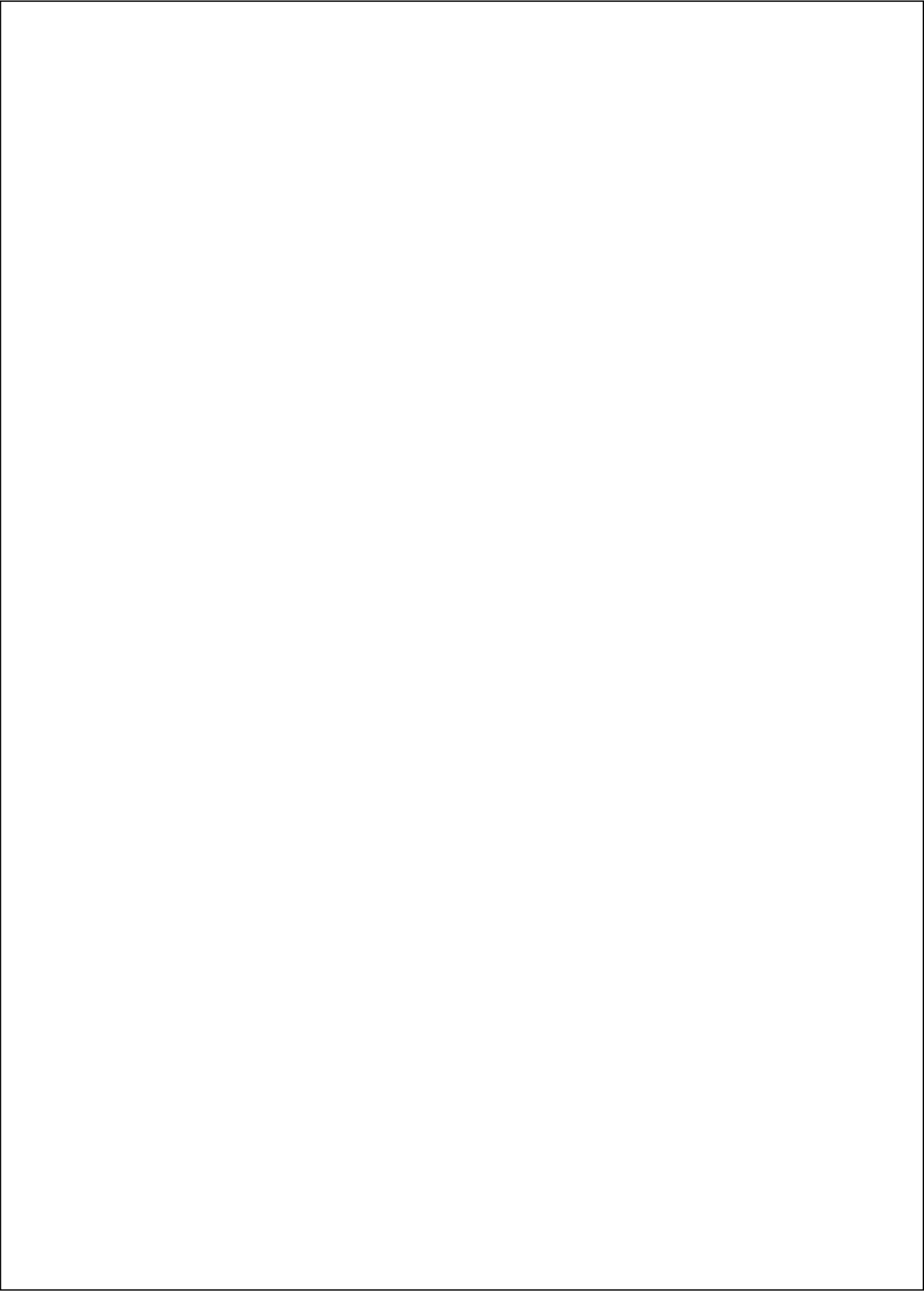
Submission ID: 1630151559

File name: kerjasama_luar_negeri.pdf (871.81K)

Word count: 6509

Character count: 43865





**KERJASAMA LUAR NEGERI
PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENDUKUNG PENGUATAN KEAMANAN
MANUSIA
(Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri
Pemprov D.I. Yogyakarta)**

Fadhlan Nur Hakiem

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Darussalam Gontor
Email: fadhlanhakiem@unida.gontor.ac.id

Ida Susilowati

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Darussalam Gontor
Email: idasusilowati@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Desentralisasi memberikan wewenang yang sangat luas bagi Pemerintah Daerah, baik pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi. Peraturan tersebut memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat mendukung penguatan keamanan manusia di Indonesia. Kerjasama luar negeri dan Peran Pemerintah daerah dapat

berkontribusi terhadap penguatan keamanan manusia. Hal ini diharapkan dapat tergambarkan melalui penyelidikan yang mendalam terhadap kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta. Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta adalah salah satu

Pemerintah Daerah yang melakukan berbagai kerjasama luar negeri dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan Lembaga swadaya masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kajian kepustakaan dan wawancara yang mendalam dengan pihak terkait. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung penguatan keamanan manusia terutama dalam melindungi keamanan ekonomi.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Kerjasama Luar Negeri; Keamanan Manusia

Abstract

Decentralization provides significant authority for Local Government, either District / City or Provincial governments. This regulation gives Local Government's authority to conduct international cooperation. This research aims at analyzing how the international cooperation of Local Government can strengthen human security in Indonesia. International cooperation and the role of local government can contribute to reinforcing human security. This contribution is expected to be able to describe the in-depth investigation of international cooperation carried out by the Local Government of Yogyakarta Province. Yogyakarta Province is one of the local governments performing a variety of international cooperations with various parties including government, private institutions, and non-governmental organizations. The research can be categorized as qualitative research done through a case study. The data will be collected through interviews and literature study. The results of this research show

that international cooperation undertaken by local governments indicates a significant role to strengthen human security, especially the protection for economic security.

Key Words: Human Security; International Cooperation; Local Government

1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan fenomena penting yang memicu perubahan-perubahan mendasar dalam dinamika hubungan internasional. Appadurai menyebutkan bahwa globalisasi memengaruhi perluasan terhadap lima elemen yang fundamental, yaitu *technoscapes; ethnoscapes; financescapes; mediascapes; dan ideascapes* (Appadurai, 1990). Pengaruh globalisasi tersebut mengubah struktur sosial, budaya, dan politik yang sudah ada sebelumnya. Dalam hubungan internasional, lebih khusus hubungan antar negara, fenomena globalisasi tersebut menyebabkan hubungan antar negara menjadi semakin erat dan tergantung satu sama lain. Hal ini terjadi karena di era globalisasi, negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dinamika hubungan internasional menjadi semakin kompleks, dimana interaksi dalam hubungan internasional tidak didominasi oleh aktor negara. Aktor-aktor non-negara mampu berperan sama pentingnya dengan negara. Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi aktor sub-nasional (Baca: Pemerintah Daerah atau Pemerintah Lokal) untuk dapat memainkan peran yang strategis dalam dinamika hubungan internasional.

Berakhirnya Orde Baru telah membuka babak baru dalam dinamika politik domestik Indonesia. *Era Reformasi yang lahir*

pasca tumbangnya Orde Baru, membawa pemikiran-pemikiran baru tentang sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dihasilkan oleh Orde Reformasi adalah konsep desentralisasi yang termanifestasikan dalam pemberlakuan otonomi daerah. Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah¹ menjadi payung hukum yang melandasi pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. UU tersebut merupakan capaian penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Melalui UU tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan sangat sangat luas, termasuk juga kewenangan untuk melakukan kerjasama luar negeri (UU Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, 1999).

Kewenangan Pemda yang luas di era Reformasi mendorong berbagai Daerah untuk melakukan berbagai inovasi kebijakan. Pemda berupaya untuk memajukan wilayahnya termasuk juga dengan melakukan kerjasama luar negeri dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Menurut catatan Treaty Room Kementrian Luar Negeri, kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemda di Indonesia mencapai tidak kurang dari 70 kerjasama luar negeri ("Data Perjanjian Luar Negeri," n.d.). Salah satu Pemda yang aktif melakukan kerjasama luar negeri adalah Pemda Provinsi D.I Yogyakarta (Pemprov Yogyakarta). Pemprov Yogyakarta telah melakukan berbagai kerjasama luar negeri baik dengan Pemerintah Daerah di luar negeri maupun dengan pihak non-negara. Mukti mencatat bahwa hingga tahun 2013, Pemprov Yogyakarta telah melakukan lebih dari 13 kerjasama luar negeri dari 10 negara asing (Mukti, 2013).

¹UU ini telah mengalami dua kali perbaikan, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kewenangan Pemda yang menjadi lebih luas setelah pemberlakuan Otonomi daerah memberikan harapan perbaikan kehidupan masyarakat di daerah. Kerjasama luar negeri sebagai salah satu kebijakan Pemda diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Salah satu indikator penting dalam upaya memberikan dampak positif terhadap masyarakat adalah terpenuhinya keamanan manusia masyarakat di daerah.

Keamanan manusia merupakan satu konsep keamanan yang menekankan pemenuhan keamanan setiap manusia melalui pembangunan (Wardoyo, 2015). Pemenuhan terhadap keamanan manusia akan mendorong peningkatan terhadap kualitas hidup masyarakat. Hal ini terjadi karena dengan pemenuhan terhadap keamanan manusia maka akan berdampak pada terhindarnya manusia dari ancaman rasa takut dan ancaman kekurangan.

Pemenuhan terhadap keamanan manusia dapat dilakukan melalui pembangunan. Salah satu instrumen yang penting dalam pembangunan adalah dengan melakukan kerjasama luar negeri oleh Pemda. Peran Pemda melalui kerjasama luar negeri akan sangat strategis dalam upaya pemenuhan atau penguatan keamanan manusia di Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk melihat apa peran penting Pemda dalam melakukan penguatan keamanan manusia? Bagaimana kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemda dapat mendukung penguatan keamanan manusia?

2 Tinjauan Pustaka

1.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kerjasama luar negeri adalah

salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemda. Kewenangan yang dimiliki tersebut kemudian dijelaskan lebih jauh dalam penelitian Jawahir Thontowi yang berjudul *Kewenangan Daerah dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat dan DIY)*. Penelitian ini menjelaskan bahwa kewenangan pelaksanaan politik luar negeri adalah kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemberlakuan Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan ruang bagi Pemda untuk melakukan kerjasama luar negeri (Thontowi, 2009). Berdasarkan UU tersebut, Pemda dapat melakukan kerjasama luar negeri dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan.

Pemda memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan kerjasama internasional. Setiap usulan kerjasama luar negeri yang diajukan oleh Pemda, wajib memenuhi beberapa persyaratan, seperti: a) kerjasama dilaksanakan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dan dalam kerangka kerja negara kesatuan; b) kerjasama luar negeri yang diusulkan harus sesuai dengan per-Undang-Undangan; c) tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri; d) tidak melanggar prinsip non-intervensi; e) berdasarkan persamaan hak; f) berdasarkan persamaan kedudukan; g) mendukung penyelenggaraan pemerintahan; h) tidak bertentangan dengan politik dan kebijakan luar negeri pemerintahan pusat; i) tidak mengancam keamanan domestik; j) secara legal tidak terdapat kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian-kerugian; dan k) tidak bertentangan dengan kebijakan

departemen teknis terkait (Thontowi, 2009).

Penelitian ini berargumen bahwa Pemda yang melakukan kerjasama internasional tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemda dinilai sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan negara, kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Pemda (Thontowi, 2009). Berdasarkan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemda Jawa Barat dan Yogyakarta, terdapat tiga model perjanjian internasional yang dilakukan yaitu: a) perjanjian kerjasama luar negeri *government to government*; b) kerjasama antara Pemda dengan swasta asing; c) kerjasama Pemda dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) luar negeri (Thontowi, 2009). Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh kedua daerah tersebut tidak bertentangan karena konteks kerjasama tersebut adalah agen dari negara sebagai subjek hukum internasional.

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemda merupakan bentuk kerjasama internasional yang dikenal dengan istilah paradiplomasi. Penelitian berikutnya menjelaskan tentang praktik kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia. Penelitian tersebut ialah penelitian Ali Maksum dan Surwandono yang berjudul *The Dynamics of Paradiplomasy Practices in Frontier Areas in Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik-praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemda khususnya wilayah yang berada di perbatasan Indonesia. Penelitian ini terpusat kepada dua wilayah perbatasan yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.

Paradiplomasi merupakan suatu kerjasama luar negeri yang lazim dilakukan oleh Pemda pasca jatuhnya Presiden

Suharto. Paradiplomasi menjadi kebijakan yang menjadi model pemda dalam upaya meningkatkan ekonomi melalui jaringan internasional. Desentralisasi menjadi salah satu ruh yang dibawa oleh pemerintah Indonesia di era Reformasi. Kekuasaan dan wewenang yang terpusat selama pemerintahan Suharto kemudian di distribusikan ke daerah pada era Reformasi. Kekuasaan dan wewenang yang terdesentralisasi ke daerah menyebabkan daerah mampu membangun kerjasama luar negeri.

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kedua wilayah tersebut dinilai sebagai wilayah yang strategis karena langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga, Letak strategis tersebut dapat menarik perdagangan internasional dan investasi di wilayah tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa paradiplomasi yang dilakukan secara “seremonial” masih dilakukan dengan intensif. Paradiplomasi merupakan diplomasi yang dilakukan oleh sub-nasional, atau intitusi lokal untuk memenuhi kepentingannya (Maksum & Surwandono, 2019). Praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, membuka beberapa kesempatan kerjasama terutama dalam bidang ekonomi seperti, perdagangan dan investasi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa paradiplomasi yang dilakukan seringkali terjebak menjadi paradiplomasi seremonial. Menurut Maksum dan surwandono, paradiplomasi seremonial merujuk pada paradigma formalitas yang berkembang di negara-negara Asia dengan sistem demokrasi yang baru lahir (Maksum & Surwandono, 2019). Kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan tidak lebih dari bentuk-bentuk seremonial dan formalitas untuk memenuhi syarat pemenuhan kinerja dan minim substansi.

Terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa paradiplomasi yang dilakukan di wilayah perbatasan yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat berjalan dengan relatif berhasil. Indikator keberhasilan tersebut adalah pencapaian investasi yang diperoleh kedua daerah yang cukup signifikan. Sebagian besar kerjasama dilakukan oleh elit lokal. Tingginya jumlah investasi yang masuk di wilayah tersebut juga memengaruhi perkembangan ekonomi lokal (Maksum & Surwandono, 2019). Namun, praktik ini bukan tanpa celah. Tantangan menghilangkan paradiplomasi seremonial masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, selain itu pengaruh terhadap pemberdayaan terhadap masyarakat yang masih tertinggal juga masih sangat minim.

Kerjasama luar negeri yang dilakukan Pemda memiliki potensi untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kerjasama Pemda juga memiliki peran yang strategis, salah satunya adalah dalam mendorong keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Penelitian Nurul Isnaeni yang berjudul *Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan*, menggambarkan peran strategis tersebut. Penelitian ini berargumen bahwa Pemda khususnya Pemerintah Kota (Pemkot) memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam upaya mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Berfokus pada kerjasama internasional yang dikembangkan kota Surabaya dengan kota Kitayushu, penelitian ini menemukan bahwa kerjasama internasional mampu menjadi mekanisme yang efektif bagi Pemkot untuk mendukung agenda pembangunan (Isnaeni, 2012).

Penelitian ini melihat bahwa peran strategis yang dimiliki oleh Pemerintah Lokal dapat terwujud melalui peran Pemkot yang

melakukan kerjasama Kota kembar (*sister city*). Melalui mekanisme tersebut, Pemkot dapat memainkan peran yang signifikan dan membangun jejaring transnasional untuk mendukung visi pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dalam praktek kerjasama kota kembar yang dilakukan antara Pemkot Surabaya dan kota Kitayushu. Kerjasama Surabaya dan Kitayushu telah memberikan manfaat dari kerjasama internasional yang dilakukan. Kerjasama tersebut berjalan dengan efektif untuk mengatasi permasalahan persampahan perkotaan (Isnaeni, 2012).

Kerjasama Pemkot Surabaya dengan Kitayushu menjadikan Surabaya menjadi anggota dari *Kitayushu Initiative Network*. Surabaya mendapatkan dukungan dana, bantuan teknik atas terselenggaranya kerjasama tersebut (Isnaeni, 2012). Kerjasama tersebut mendorong pengembangan program manajemen persampahan yang berbasis pada masyarakat yang menerapkan prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*. Implementasi program ini mencakup berbagai hal seperti penelitian, sosialisasi hasil, dan konsultasi tentang persampahan dan pengelolaan masalah persampahan (Isnaeni, 2012). Program-program menjadi indikator keberhasilan kerjasama internasional antara Surabaya dan Kitayushu. Penelitian ini juga berpendapat bahwa keberhasilan kerjasama Surabaya dan Kitayushu tidak sebatas terletak pada keberhasilan reduksi sampah yang telah dilakukan. Keberhasilan yang lebih esensial adalah bahwa meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik yang meluas, yang mendorong demokrasi partisipatoris dan menopang program pembangunan berkelanjutan (Isnaeni, 2012).

1.2 Kerangka Konseptual

1.2.1 Paradiplomasi

Hubungan internasional dalam bentuk yang tradisional melihat bahwa kerjasama luar negeri merupakan wewenang dari negara atau pemerintah pusat. Namun pandangan ini mengalami tantangan dengan munculnya fenomena globalisasi. Negara menjadi semakin tergantung sama lain dan mustahil untuk bertahan hidup tanpa ada interaksi dengan aktor-aktor lainnya. Kerjasama tidak bisa lagi dimonopoli oleh negara sebagai aktor utama. Salah satu aktor yang muncul dan memengaruhi dinamika hubungan internasional adalah aktor sub-nasional. Aktor sub-nasional yang berpengaruh tersebut adalah *cities* dan *states* (*cantons, counties, departments, districts, krays, lander, oblasts, okrugs, prefectures, provinces, regions, republics, territories*, atau *zones*) (Tavares, 2016).

Meningkatnya peran sub-nasional dalam dinamika hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari fenomena urbanisasi global. Menurut UN-Habitat dalam tavares, sebanyak 75% jumlah populasi di dunia akan tinggal di kota pada tahun 2050; Kemudian, terjadi tranformasi yang sangat besar yang meliputi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan selama kurun waktu 100 tahun (1950 – 2050). Terakhir, lebih dari 80% ouput ekonomi global dihasilkan oleh kota (Tavares, 2016). Fenomena tersebut menyebabkan sub-nasional terutama kota menjadi penting dalam dinamika hubungan internasional.

Kemunculan sub-nasional sebagai aktor dalam dinamika hubungan internasional membawa konsep baru dalam ilmu hubungan internasional. Konsep tersebut adalah konsep kerjasama

pada level sub-nasional yang sering disebut sebagai paradiplomasi. Paradiplomasi muncul sebagai salah satu konsep pada tahun 1980an dalam tulisan Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos (Tavares, 2016). Paradiplomacy merupakan singkatan dari "*parallel diplomacy*." "*Para*" berasal dari Bahasa Yunani yang berarti *beside, near, alongside, subsidiary*, atau *assistant* (Tavares, 2016). Menurut Soldatos dalam Tavares, beberapa sarjana melihat bahwa paradiplomasi berkaitan dengan diplomasi. Sehingga paradiplomasi didefinisikan sebagai kegiatan internasional yang dilakukan oleh aktor sub-nasional yang mendukung, melengkapi, memperbaiki, menduplikasi, atau menantang diplomasi yang dilakukan oleh negara (Tavares, 2016). Menurut Mukti, paradiplomasi merupakan perilaku yang mengacu pada "perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas sub-state dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik" (Mukti, 2013).

Konsep paradiplomasi selaras dengan beberapa istilah lainnya seperti istilah Diplomasi Federatif di Brasil. Istilah ini kemudian berubah menjadi desentralisasi kerjasama internasional (Tavares, 2016). Selain istilah desentralisasi kerjasama internasional, terdapat beberapa istilah yang selaras dengan praktik paradiplomasi yaitu *subnational foreign affairs, subnational foreign policy, substate diplomacy, multilayered diplomacy, constituent diplomacy, local government external action, local diplomacy, local foreign policy, regional diplomacy, plurinational diplomacy, pos-diplomacy, microdiplomacy*, dan *foreign policy localization* (Tavares, 2016). Istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama dengan istilah paradiplomasi. Praktik kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh aktor sub-nasional yang lebih menekankan pada kerjasama dan kemitraan untuk kepentingan tertentu secara spesifik.

1.2.2 Keamanan manusia

Perluasan dan pendalaman keamanan menyebabkan perubahan yang mendasar dalam studi keamanan. Berbagai pihak menanyakan kembali tentang definisi keamanan yang didominasi oleh pendekatan yang *state-centric*. Pada tahun 1983, Barry Buzan dalam tulisannya, menantang definisi yang telah mapan tersebut. Buzan berpendapat bahwa keamanan tidak hanya berbicara tentang negara yang terpusat pada kekuatan militer, tetapi memiliki relasi terhadap seluruh kemanusiaan secara kolektif (Williams, 2008). Gugatan Buzan terhadap konsep keamanan tradisional membuka jalan munculnya berbagai perspektif keamanan yang menggugat keamanan pendekatan tradisional.

Salah satu konsep yang muncul sebagai konsekuensi dari perluasan dan pendalaman dalam studi keamanan adalah konsep keamanan manusia. Konsep keamanan manusia tidak bisa dilepaskan dari agenda PBB. PBB berusaha untuk berperan secara aktif dalam ancaman keamanan yang berkembang secara pesat pasca perang dingin (Wardoyo, 2015). Agenda keamanan manusia menjadi pendekatan yang penting dan signifikan dalam studi keamanan. Penguatan pendekatan keamanan manusia menjadi tanda perubahan prioritas keamanan. Keamanan tidak bisa lagi hanya menjadikan keamanan negara sebagai prioritas, tetapi keamanan terhadap manusia menjadi lebih penting daripada keamanan negara. Dengan demikian maka terjadi perluasan prioritas dari keamanan melalui persenjataan menuju keamanan melalui pembangunan umat manusia (Wardoyo, 2015).

Keamanan manusia menjadikan manusia sebagai pusat atau inti dari keamanan. Oleh karena itu, *basic human rights* dan berbagai

turunannya menjadi penting untuk dijaga dari berbagai ancaman yang ada. Selain itu, keamanan manusia tidak hanya berpusat pada pemenuhan *basic human rights*, tetapi juga termasuk dalam beberapa hal seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan ancaman-ancaman lainnya terhadap penghidupan dan kesejahteraan individu (Williams, 2008). Menurut UNDP, keamanan manusia dapat didefinisikan sebagai:

Human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease, and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether at home, in jobs or in communities. Such threats can exist at all levels of national income and development (1994, 23).

Berdasarkan definisi tersebut, UNDP membagi keamanan manusia kedalam tujuh (7) elemen. Elemen-elemen keamanan manusia tersebut adalah: a) keamanan ekonomi; b) keamanan pangan; c) keamanan lingkungan; d) keamanan kesehatan; e) keamanan komunitas; f) keamanan personal; dan, g) keamanan politik (UNDP, 1994). Keamanan mengalami perluasan isu, dimana isu-isu *low politics* menjadi sama pentingnya dengan isu-isu *high politics*. Isu-isu seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pangan menjadi sama pentingnya dengan isu-isu militer dan pertahanan. Berdasarkan hal tersebut, keamanan manusia dapat dimaknai sebagai tujuan keamanan manusia untuk melindungi manusia (*freedom from fear*) dan mencapai kesejahteraan manusia (*freedom from want*). Lebih lanjut, menurut Wardoyo bahwa hakikat keamanan manusia adalah untuk memberikan kekuatan dan pemberdayaan bagi manusia dan masyarakat sebagai inti dari keamanan (Wardoyo, 2015).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan cara melakukan deskripsi menggunakan -pertanyaan-pertanyaan melalui metode ilmiah (Moleong, 2014). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial seperti, perilaku, persepsi, maupun tindakan sosial melalui deskripsi terhadap fenomena sosial tersebut dalam bentuk non-numerik. Setelah melakukan deskripsi terhadap objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi literatur. Selain wawancara, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui studi literatur, studi literatur digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung analisis data.

Analisa data digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau menguji hipotesa yang telah dinyatakan sebelumnya. Analisa data merupakan proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi (Moleong, 2014). Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Silalahi, 2012).

4 Hasil dan Pembahasan Penelitian

3.1 Kerjasama Luar Negeri Pemprov Yogyakarta

Pemprov Yogyakarta adalah salah satu Pemda yang memiliki kerjasama luar negeri relatif banyak jumlahnya di Indonesia. Kerjasama luar negeri dilakukan pertama kali oleh Pemprov Yogyakarta pada tahun 1985. Pemprov Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Prefektur Kyoto pada tanggal 16 Juli 1985. Kerjasama antara kedua pemerintahan tersebut meliputi berbagai bidang yaitu: seni budaya, Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan industri (Hariyono, 2019). Pemprov Yogyakarta telah memiliki 31 kerjasama luar negeri hingga tahun 2019 (Hariyono, 2019). Kerjasama luar negeri tersebut mayoritas dilakukan pada era reformasi. Kerjasama yang dilakukan pada era reformasi tercatat mencapai 86% dari jumlah keseluruhan kerjasama luar negeri yang telah dilakukan. Berikut ini adalah daftar kerjasama luar negeri yang telah dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta:

Tabel 4.1 Kerjasama Internasional Pemda Yogyakarta

No	Provinsi / Negara	Tahun
1	Prefektur Kyoto / Jepang	1985, 2010, 2015
2	Ismailia / Mesir	1990, 1991
3	Negara Bagian California / AS	1997
4	East Asia Tourism Organization Forum	1999
5	Land Tyrol / Austria	1999
6	Gyeongsangbuk-do / Korea Selatan	2005, 2008, 2015
7	Surugawa Miyagawa	2003, 2008
8	Karsruhe University / Jerman	2004, 2005, 2008, 2010

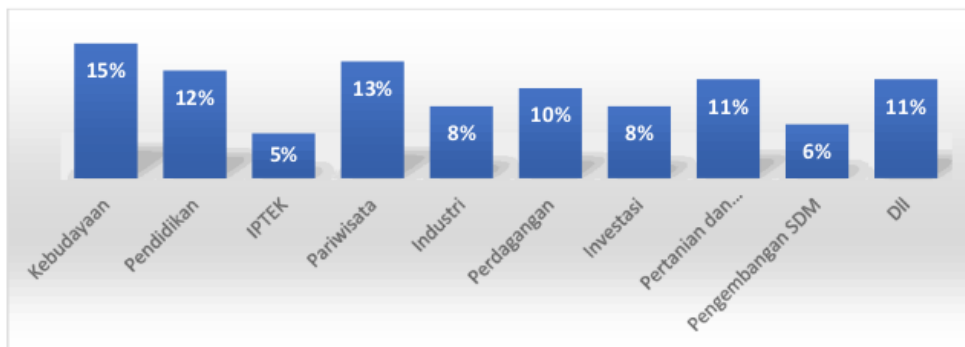
No	Provinsi / Negara	Tahun
9	Chungcheongnam-do / Korea Selatan	2004
10	Medical Peace Foundation	2007
11	International Finance Corporation	2007
12	Chiang Mai / Thailand	2007
13	Gang-won / Korea Selatan	2008, 2009
14	HNA Group / Cina	2009
15	East Asia Local and Regional Congress	2010
16	Saint-Petersburg / Russia	2010
17	Juma' Al Majid / UEA	2011
18	Dongbu Engineering	2012
19	Kayseri / Turki	2013
20	Shanghai / Cina	2014
21	Shanghai Theater Academy / Cina	2016
22	Adelaide Festival Centre / Australia	2015
23	The State of Victoria / Australia	2015
24	AIC, Monash University / Australia	2015
25	Victoria / Australia	2017
26	Melbourne Symphony Orchestra / Australia	2017
27	Prefektur Yamanashi / Jepang	2015, 2016
28	Inonesienne d Nouvelle Caledonia	2016
29	Singapore International Foundation	2017
30	Welfalishe Wilhems	2015
31	Vereginig Herdenking Javaanse	2013

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pemprov Yogyakarta melakukan kerjasama luar negeri dalam berbagai bentuk. 62% kerjasama luar negeri pemprov Yogyakarta telah disepakati dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU). 24% kerjasama luar negeri yang disepakati dalam bentuk *Letter of Intent* (LOI), dan 13 % kerjasama luar negeri pemerintah Yogyakarta dalam bentuk lainnya ("Kerjasama," n.d.). Kerjasama

luar negeri Pemprov Yogyakarta dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu: 1) kerjasama Pemprov Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah di Luar negeri; 2) kerjasama Pemprov Yogyakarta dengan pihak swasta; dan 3) kerjasama Pemprov Yogyakarta dengan pihak NGO (Non-Governmental Organizations). Mayoritas kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta adalah kerjasama antar Pemerintah daerah. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta meliputi kerjasama dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah berbagai bidang kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta:

Gambar 4.1 Bidang Kerjasama Pemprov Yogyakarta



(Sumber: Diolah dari berbagai sumber)

Pemprov Yogyakarta merupakan salah satu Pemda terdepan dalam melakukan kerjasama luar negeri, selain Pemprov Jawa Barat dan Pemprov DKI Jakarta. Menurut DPPM, banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta karena beberapa hal yaitu: *pertama*, Yogyakarta merupakan wilayah yang istimewa karena berbentuk kesultanan. *Kedua*, Yogyakarta memiliki kebudayaan yang khas dan memiliki sektor pariwisata yang baik

(Hariyono, 2019). Ciri khas tersebut mendorong banyak pihak luar negeri untuk melakukan kunjungan dan berkerjasama dengan Pemprov Yogyakarta.

Kerjasama luar negeri yang dimiliki oleh Pemprov Yogyakarta sudah mencapai 31 kerjasama luar negeri. Namun, dari jumlah tersebut tidak semua kerjasama luar negeri masih berlangsung dan berkelanjutan. Menurut DPPM, hingga tahun 2019 terdapat 5 kerjasama luar negeri yang masih berjalan. Kerjasama luar negeri tersebut adalah kerjasama luar negeri dengan Pemerintah Victoria, Australia, Prefektur Yamanashi dan Kyoto, Jepang, Provinsi Gangwon dan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan (Hariyono, 2019).

3.1.1 Kerjasama antara Yogyakarta dan Kyoto, Jepang

Kerjasama luar negeri yang dilakukan Pemprov Yogyakarta dengan Pemerintah Prefektur Kyoto merupakan kerjasama luar negeri pertama yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta. Kerjasama ini secara resmi mulai berjalan pada tahun 1985. Kerjasama kedua belah pihak tidak terlepas dari faktor historis, kedekatan antara Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Gubernur Kyoto Yukio Hayashida (Mukti, 2013). Hayashida merupakan tokoh yang pernah tinggal di Yogyakarta selama Perang Dunia kedua. Program kerjasama Provinsi Kembar yang disepakati kedua belah pihak meliputi beberapa hal seperti kerjasama seni dan budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan industry (Mukti, 2013).

Kerjasama kedua belah pihak telah melahirkan berbagai program yang telah diimplementasikan, beberapa contoh dari program tersebut adalah: a) pengiriman petugas untuk belajar teknis

konservasi pelestarian lingkungan cagar budaya; b) pengiriman misi kesenian do Kyoto; c) pemberian beasiswa bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi ke Jepang; d) penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di Kawasan Tamansari, Kotageda, Situd Gamping, dan Candi Boko; e) pengiriman petugas untuk belajar budidaya hortikultura di lahan kering dan kultur jaringan; f) bantuan gempa bumi pada tahun 2006 [Mukti].

3.12 Kerjasama antara Yogyakarta dan Victoria, Australia

Kerjasama antara Provinsi Yogyakarta dan Victoria mulai diupayakan sejak tahun 2013. Kerjasama yang diusulkan pertama kali adalah kerjasama di bidang seni dan budaya. Pada tahun 2014, Pemprov Yogyakarta melakukan kunjungan atas undangan Pemerintah Victoria. Pada kunjungan tersebut melahirkan kesepakatan kemungkinan kerjasama anntara kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, yaitu bidang seni budaya, bidang pendidikan, dan bidang investasi dan pariwisata ("Kerjasama DIY - Australia," n.d.). Setelah melalui serangkaian proses yang cukup Panjang, kedua wilayah sepakat untuk menandatangani *Letter of Intent* tentang Kerjasama kedua wilayah pada tanggal 30 September 2015. Selanjutnya pada tanggal 14 November 2015, kedua wilayah sepakat untuk menindaklanjuti *Letter of Intent* untuk ditandatangani menjadi MOU. MOU kedua wilayah pada akhirnya disepakati untuk ditandatangani pada tanggal 3 Mei 2017. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang budaya, industry, dan pendidikan ("Kerjasama DIY - Australia," n.d.).

3.13 Kerjasama antara Yogyakarta dan Yamanashi, Jepang

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta dengan Pemerintah Yamanashi mulai dilakukan penjajakan pada tahun 2014. Wakil Gubernur Prefektur Yamanashi, Wataru Hiraide melakukan kunjung ke Yogyakarta untuk menjajaki kemungkinan kerjasama luar negeri pada Agustus, 2014 ("Kerjasama DIY - Jepang," n.d.). Hiraide mendorong agar terwujudnya kerjasama dalam berbagai bidang seperti pada bidang pariwisata, pertanian, kebudayaan, dan pergunungapian ("Kerjasama DIY - Jepang," n.d.). Kedua belah pihak kemudian sepakat untuk menandatangani *Letter of Intent* pada tahun 2015 dan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU pada tahun 2016. Penandatanganan MOU tersebut menjadi langkah kerjasama kedua belah pihak dalam bidang pariwisata, pertanian, dan pendidikan ("Kerjasama DIY - Jepang," n.d.).

Kerjasama kedua belah pihak telah berhasil diimplementasikan. Salah satu implememtasi tersebut adalah kerjasama dibidang pertanian. Berbagai program dilakukan dalam bidang pertanian, seperti kesempatan bagi tenaga pertanian Pemprov Yogyakarta untuk melakukan pelatihan di Yamanashi selama 2 bulan ("Kerjasama DIY - Jepang," n.d.). Prefektur Yamanashi juga mengirimkan tenaga pertaniannya ke Yogyakarta sebanyak dua kali dalam satu tahun ("Kerjasama DIY - Jepang," n.d.). Selain pengiriman tenaga pertanian, terdapat program pengembangan budidaya anggur dan stroberi di beberapa titik di Yogyakarta. Beberapa daerah seperti Kecamatan Turi, Cangkringan, Samigaluh, Ngipiksari, dan Wijilan dijadikan sebagai tempat pengembangan kerjasama pertanian ("Kerjasama DIY - Jepang," n.d.).

3.14 Kerjasama antara Yogyakarta dan Ganwong, Korea Selatan

Pemprov Yogyakarta dan Provinsi Gangwon telah melakukan penandatanganan *Letter of Intent* pada tahun 2008. Meskipun demikian penajakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama telah dimulai sejak tahun 2003. Pada tahun 2009, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan MUU yang menyepakati kerjasama dalam 7 bidang, yaitu pariwisata, agrikultur, sains dan teknologi, budaya, pendidikan, olahraga, dan bidang tambahan lainnya yang diusulkan dan disetujui oleh kedua belah pihak ("Kerjasama DIY - Korea," n.d.).

Kerjasama kedua belah pihak meliputi berbagai bidang. Namun demikian tidak semua bidang kerjasama berhasil dilaksanakan. Implementasi kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak lebih menekankan pada aspek budaya. Salah satu contoh impleentasi tersebut adalah keterlibatan Pemprov Yogyakarta dalam kegiatan yang berjudul "*2011 Ganwong Provincial Program for Local Government Officials of sisterhood governments*" ("Kerjasama DIY - Korea," n.d.). Kegiatan ini menekankan pengenalan budaya Korea Selatan yang meliputi pengenalan huruf Hangeul, pengenalan sruktur Bahasa Korea, memperkenalkan Bahasa Korea ("Kerjasama DIY - Korea," n.d.)

3.15 Kerjasama antara Yogyakarta dan Gyeongsanbuk-do, Korea Selatan

Kerjasama luar negeri antara Premprov Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsanbuk-do telah berjalan sejak tahun 2005. Pada tahun tersebut kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam

kerangka Provinsi Kembar (*Sister Province*). Pendatangan MOU dilakukan oleh kedua belah pihak pada tanggal 24 Februari 2005 ("Kerjasama DIY - Korea," n.d.). Penandatanganan MOU tersebut, adalah tindak lanjut dari penandatanganan *Letter of Intent* pada tahun 2003.

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah menghasilkan berbagai program yang telah diimplementasikan. Pada tahap awal kerjasama, kegiatan yang dilakukan terfokus untuk peningkatan sumber daya manusia. Salah satu programnya ialah upaya peningkatan kapabilitas aparatur Pemerintah Yogyakarta ("Kerjasama DIY - Korea," n.d.). Aparatur Pemerintah tersebut mengikuti kelas Bahasa Korea untuk meningkatkan kemampuannya. Aparatur Pemerintah mengikuti *Program Korean Language Training Program for Sister City Public Officials* yang telah berlangsung sejak tahun 2006 dan berdurasi selama 6 bulan setiap tahunnya ("Kerjasama DIY - Korea," n.d.).

Pada tahun 2007, kedua belah pihak menjajaki untuk membangun kerjasama dalam program *Saemaul Undong*. Kerjasama program *Saemaul Undong* tersebut pada akhirnya disepakati untuk diimplementasikan pada tahun 2008 dengan penandatanganan kerjasama oleh Gubernur Provinsi Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Gyeongsanbuk-do ("Kerjasama DIY - Korea," n.d.). Kerjasama Program *Saemaul Undong* dilakukan di tiga wilayah. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul. Program *Saemaul Undong* telah dilaksanakan diberbagai wilayah Yogyakarta. Menurut DPPM, hingga tahun 2012 terdapat lima (5) wilayah yang telah melaksanakan program *Saemaul Undong*. Berikut ini adalah daftar wilayah yang telah melaksanakan program *Saemaul Undong*:

Tabel 4.2 Pelaksanaan Program Saemaul Undong di Yogyakarta

Wilayah Pelaksanaan Program	Tahun Pelaksanaan
Desa Kampung, Kec. Ngawen	2008
Desa Kampun, Kec. Ngawen & Desa Pacarejo, Kec. Semanu	2009
Desa Salamrejo, Kec. Sentolo	2010
Desa Karangtalun, Kec. Imogiri	2011
Desa Banjaroyo, Kec. Kalibawang	2012

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Secara garis besar program *Saemaul Undong* meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan Infrastruktur Desa, seperti: pembangunan Gedung pertemuan, pembuatan jalan desa;
- Peningkatan Kualitas Hidup, seperti: penyediaan sumur bor;
- Peningkatan Pendapatan, seperti: program bantuan sapi;
- Aktivitas *Volunteer*, seperti: pelayanan kesehatan gratis;
- Pengenalan Kebudayaan Korea ("Kerjasama DIY - Korea," n.d.).

3.2 Kendala Implementasi Kerjasama Luar Negeri

Pemprov Yogyakarta memiliki kerjasama luar negeri yang relatif banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lain di Indonesia. Yogyakarta bersama Jawa Barat dan Jakarta menjadi daerah terdepan dalam melakukan kerjasama luar negeri atau lebih populer dengan sebutan paradiplomasi. Akan tetapi, implementasi kerjasama luar negeri pemerintah Yogyakarta mengalami beberapa kendala. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta seringkali terhenti pada tahap *Memorandum*

of Understanding (MoU). Kerjasama tersebut pada akhirnya tidak dapat diimplementasikan oleh Pemprov Yogyakarta. Kerjasama luar negeri yang masih berlangsung hingga saat ini adalah dengan 5 pemerintah negara asing. Kerjasama tersebut adalah dengan pemerintah Victoria, Prefektur Yamanashi, Prefektur, Kyoto, Provinsi Gangwon, dan Provinsi Gyeingsangbuk-do (Hariyono, 2019).

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan dilapangan menghambat implementasi kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta. Kendala-kendala tersebut ialah efisiensi anggaran, birokrasi, kepemimpinan, rekan kerjasama (Hariyono, 2019).

Pertama, efisiensi anggaran. Hal ini menjadi masalah karena anggaran memiliki peran signifikan dalam menentukan suatu kebijakan. Pemerintah daerah harus menghitung anggaran dengan efisien dan efektif agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan efektif. Kerjasama luar negeri seringkali dianggap tidak terlalu signifikan dalam pembangunan dan dianggap membebani anggaran belanja daerah.

Kedua, birokrat. Birokrat dianggap dapat menjadi kendala dalam kerjasama luar negeri karena birokrat adalah pelaksana kebijakan. Para birokrat seringkali kurang peduli terhadap kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Hal tersebut terjadi karena kerjasama luar negeri dinilai justru menambah beban kerja para birokrat di lingkungan pemerintahan daerah.

Ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemerintah di Indonesia secara umum. Dalam proses perencanaan dan implementasi kerjasama

luar negeri, visi dan misi pemimpin sangat memengaruhi kerjasama luar negeri.

Terakhir, rekan kerjasama luar negeri. Keberlangsungan kerjasama luar negeri juga sangat dipengaruhi oleh rekan yang melakukan kerjasama luar negeri. Kegagalan kerjasama pemerintahan Yogyakarta dengan negara bagian California, dan Tyrol dipicu oleh perbedaan yang signifikan antara kedua wilayah tersebut sebagai rekan kerjasama dengan pemerintahan Yogyakarta.

3.3 Kerjasama Luar Negeri dan Penguatan Terhadap Keamanan Manusia

Kerjasama luar negeri pemerintah Yogyakarta merupakan salah satu bentuk praktik paradiplomasi. Paradiplomasi memiliki kepentingan yang secara spesifik menjadi tujuan dari entitas sub-nasional dalam melakukan hubungan internasional. Salah satu tujuan penting dari praktik paradiplomasi adalah tercapainya kepentingan dari sub-nasional. Tujuan utama Pemda sebagai salah satu sub-nasional dalam melakukan kerjasama adalah meningkatkan pembangunan di daerah. Salah satu aspek yang dapat mendukung peningkatan pembangunan tersebut adalah keamanan manusia.

Keamanan manusia merupakan konsep yang berkembang pasca perang dingin. Konsep ini menekankan pemenuhan kebutuhan mendasar manusia yaitu terbebasnya manusia dari ketakutan (*freedom from fear*) dan terbebas dari rasa keterbatasan (*freedom from want*). Wardoyo menyebutkan bahwa keamanan manusia merupakan keamanan melalui pembangunan (Wardoyo, 2015).

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta meliputi berbagai aspek, sebagaimana tergambar

dalam gambar 4.1. Kerjasama yang dilakukan dalam berbagai bidang tersebut berpotensi mendukung penguatan aspek keamanan manusia. Namun demikian, tidak semua aspek keamanan manusia dapat dikuatkan oleh kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta hanya dapat memberikan penguatan terhadap beberapa aspek dalam keamanan manusia.

Kerjasama luar negeri dapat memberikan penguatan terhadap keamanan manusia terutama pada aspek keamanan ekonomi. Hal ini sebagaimana tergambarkan dalam implementasi kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Yogyakarta dengan Prefektur Yamanashi, Jepang dan Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Pemerintah Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Prefektur Yamanashi pada tahun 2015. Kedua pihak menyepakati *Letter of Intent* pada tahun 2015 dan kemudian dilanjutkan dengan pendatangannya MOU pada tahun 2016. Implementasi dari kerjasama tersebut kemudian terpusat pada upaya penguatan di sektor pertanian. Pada tahun 2018, dan 2019, terdapat beberapa kegiatan sebagai hasil implementasi dari kerjasama kedua belah pihak tersebut. Implementasi kerjasama dari kedua pihak tersebut adalah:

- a. Pengiriman tenaga magang sejumlah 1 orang dari UPTD unit Ngipiksari ke Yamanashi selama 2 bulan;
- b. Pendampingan teknisi dari Yamanashi untuk budidaya tanaman anggur, stroberi, dan bunga di Yogyakarta;
- c. Budidaya tanaman stroberi di unit Ngipiksari;
- d. Budidaya tanaman anggur di unit Ngipiksari;
- e. Budidaya tanaman stroberi di Srunen, Glagahharjo, Cangkringan, Sleman;

- f. Budidaya tanaman anggur di Kaling tengah, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman ("Kerjasama DIY - Jepang," n.d.).

Melalui kerjasama luar negeri tersebut, pemerintah Yogyakarta berharap agar mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Beberapa hal yang diharapkan dapat terwujud dari kerjasama ini adalah sarana produksi anggur dan stroberi, bantuan infrastruktur, teknologi budidaya anggur dan stroberi, dan pelatihan budidaya anggur dan stroberi ("Kerjasama DIY - Jepang," n.d.)

Selain Prefektur Yamanashi, kerjasama yang memiliki pengaruh terhadap penguatan keamanan manusia adalah kerjasama Pemprov Yogyakarta dengan Gyeongsanbuk-do, Korea Selatan. Setelah pendatangan *Letter of Intent* dan MOU pada tahun 2006, kedua pihak banyak melakukan kerjasama luar negeri dalam kerangka *sister province*. Berbagai kegiatan telah dilakukan seperti peningkatan kapabilitas apataur daerah DIY. Sejak tahun 2006 telah dilakukan program kelas bahasa Korea dimana pemerintahan Yogyakarta rutin mengirimkan wakilnya ke Korea setiap tahun selama 6 bulan untuk mengikuti program *Korean Language Training Program for Sister City Public Officials* ("Kerjasama DIY - Korea," n.d.).

Kerjasama yang sangat penting yang dilakukan oleh kedua pihak adalah pelaksanaan program *Saemaul Undong* di Yogyakarta. Pengenalan terhadap program ini mulai dilakukan pada tahun 2007 yang kemudian disepakati dengan penandatangan MoU pada tahun 2008. Program ini telah dilaksanakan di tiga kabupaten di Yogyakarta yaitu, Kulon Progo Bantul, dan Gunungkidul. Program *Saemaul Undong* telah dilaksanakan di lima (5) wilayah di Yogyakarta, dimana Desa Kampung Kec. Ngawen menjadi *pilot project* dari program tersebut ("Kerjasama DIY - Korea," n.d.). *Saemaul Undong*

merupakan program yang fokus dalam kegiatan pemberdayaan. Program-program yang dilakukan difokuskan untuk pemberdayaan seperti bantuan untuk peningkatan pendapatan, bantuan untuk peningkatan kualitas hidup, dan berbagai program yang sifatnya kerelawanan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Kedua implemetasi kerjasama luar negeri atau praktik paradiplomasi tersebut menggambarkan dengan sangat jelas bahwa penguatan keamanan manusia dapat dilakukan melalui praktik kerjasama luar negeri. Kedua kerjasama tersebut memberikan porsi yang sangat besar bagi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut akan sangat memengaruhi penguatan keamanan manusia karena keamanan manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan. Pemberdayaan kepada masyarakat terutama melalui program di sektor pertanian dan pembangunan ekonomi masyarakat melalui desa percontohan pada akhirnya dapat meningkatkan keamanan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya akan menghindarkan masyarakat dari ancaman keterbatasan (*freedom from want*).

Meskipun demikian tidak semua kerjasama luar negeri atau praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemda dapat memberikan efek terhadap penguatan keamanan manusia. Beberapa bentuk kerjasama tersebut kurang memiliki dampak terhadap keamanan manusia. Hal ini sebagai mana tergambarkan dalam kerjasama Pemprov Yogyakarta dengan Pemerintah Victoria, Australia. Yogyakarta dan Pemprov Yogyakarta dengan Provinsi Gangwon. Kedua kerjasama tersebut lebih menitikberatkan kerjasama pada sector budaya sehingga dampak terhadap keamanan manusia tidak terlalu signifikan.

5. Kesimpulan

Keaman manusia merupakan suatu hal yang fundamental dan harus dipenuhi. Setiap warga negara berhak atas rasa aman dari rasa takut dan rasa aman dari keterbatasan. Tanggung jawab keamanan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara. Namun, aktor-aktor lain termasuk sub-nasional memiliki tanggungjawab yang sama dengan negara untuk memenuhi keamanan manusia. Pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk dari aktor sub-nasional memiliki peran yang strategis dalam mendorong penguatan terhadap keamanan manusia. Namun demikian sebagaimana tergambarkan dalam kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov Yogyakarta, pelaksanaan kerjasama luar negeri belum berjalan maksimal karena berbagai kendala yang dihadapi. Kendala tersebut harus segera diselesaikan karena kerjasama luar negeri memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pembangunan. Penguatan terhadap keamanan manusia dapat dilakukan melalui kerjasama luar negeri yang berorientasi kepada program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tergambarkan dalam program kerjasama Pemprov Yogyakarta dengan Prefektur Yamanashi dan Provinsi Gyeongsangbuk-do. Kerjasama luar negeri yang tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan atau penguatan keamanan manusia. Melalui program yang berorientasi pemberdayaan masyarakat keamanan manusia dapat dikuatkan.

Daftar Pustaka

- Appadurai, A. (1990). Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. *Theory, Culture & Society*, 7(2), 295–310. <https://doi.org/10.1177/026327690007002017>
- Data Perjanjian Luar Negeri. (n.d.). Diambil 29 September 2019, dari <https://treaty.kemlu.go.id/search>
- Hariyono, J. (2019, Juli 2012). Kerjasama Luar Negeri Provinsi Yogyakarta. (Tim Peneliti, Interviewer) Yogyakarta.
- Isnaeni, N. (2012). Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Global & Strategis*, 1(7), 123–138. Diambil dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-12> 123-138 Nurul Isnaeni - Peran Strategis Pemerintah daerah dalam Kerjasama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (ok).pdf
- Kerjasama. (n.d.). Diambil 16 September 2019, dari <https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/kerjasama.html>
- Kerjasama DIY - Australia. (n.d.). Diambil 12 September 2019, dari [https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/diy australia.html](https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/diy%20australia.html)
- Kerjasama DIY - Jepang. (n.d.). Diambil 18 September 2019, dari [https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/diy jepang.html](https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/diy%20jepang.html)
- Kerjasama DIY - Korea. (n.d.). Diambil 12 September 2019, dari [https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/diy korea.html](https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/diy%20korea.html)
- Maksum, A., & Surwandono. (2019). The Dynamics of Paradiplomacy Practices in the “Frontier” Areas in Indonesia. *Journal of ASEAN Studies*, 6(2), 137–154. <https://doi.org/10.21512/jas.v6i2.5160>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.

- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*. Yogyakarta: Phinisi Press.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial* (3 ed.). Bandung: Rafika Aditama.
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy; Cities and States as Global Players*. New York: Oxford University Press.
- Thontowi, J. (2009). Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(2), 149–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art1>
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. Oxford University Press. New York.
- UU Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (1999).
- Wardoyo, B. (2015). *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional dan Relevansinya Untuk Indonesia*. Klaten: Nugra Media.
- Williams, P. D. (2008). *Security Studies; an introduction*. New York: Routledge.

KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGUATAN KEAMANAN MANUSIA (Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov D.I. Yogyakarta)

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ garuda.ristekbrin.go.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGUATAN KEAMANAN MANUSIA (Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov D.I. Yogyakarta)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/1000

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35
